



**RENCANA KERJA (RENJA)
PROGRAM & KEGIATAN
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis dilakukan untuk melaksanakan dan mewujudkan implementasi *good financial governance* terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi, perencanaan, dan manajemen keuangan dan aset daerah yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai implementasi dari visi dan misi menuju terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, professional dan terpercaya dan handal.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis disusun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis 2016–2021. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis memuat program, kegiatan, target, indikator *outcome*, indikator *output*, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis.

Dengan ditetapkannya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan masing-masing bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2016 – 2021.

Tanggal, Februari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



AULIA, S.Pi, MT

Pembina Tk. I

NIP.19701109 199903 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KAB. BENGKALIS TAHUN 2018	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2018 dan capaian Renstra SOPD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD.....	15
2.3 Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	16
2.4 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kabupaten Bengkulu.....	23
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
4.1 Program dan Kegiatan	27
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	28
BAB V. PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan good governance, menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) dimaksudkan terutama upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 dapat terwujud.

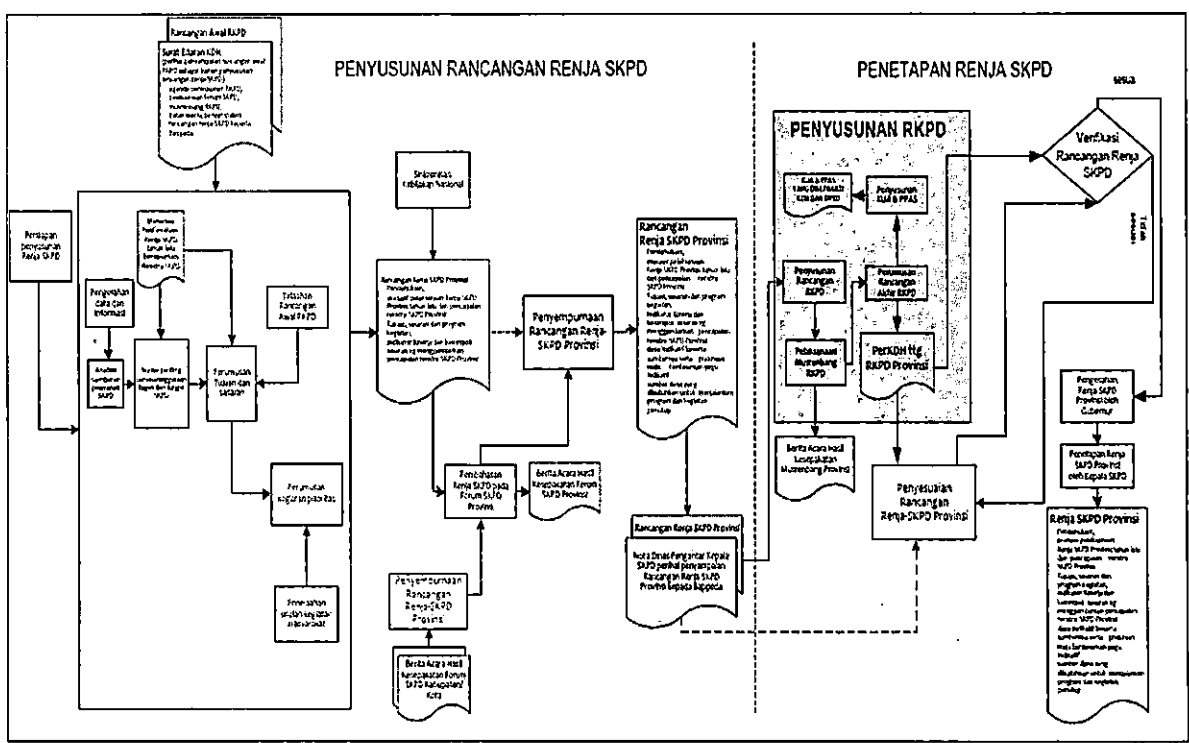
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perancangan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Penyusunan rencana kerja SKPD merupakan



produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja-SOPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-SKPD perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Secara singkat, tahapan penyusunan Renja SKPD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD.

Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 82 sampai dengan 84 untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis harus menyampaikan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020 dengan tema RKPD tahun 2020 "Menuju Kemandirian Desa yang Berkreatifan Lokal dan 5 (lima) Prioritas Pembangunan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. BPKAD selain berfungsi sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur organisasi BPKAD terbentuk dari penggabungan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan sebagian fungsi pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun

2019 menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKAD mempunyai visi dan misi. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencerminkan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- 1. Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik (*Good Financial Governance*)** mengandung makna bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaannya, penatausahaannya, pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawabannya. Tata Kelola Keuangan dan Aset yang baik juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tanggungjawab/akuntabilitas untuk memastikan perilaku pengelola keuangan dan aset yang baik untuk mencapai tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat
- 2. Profesional** bermakna bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk dilaksanakan secara profesionalitas, yaitu merupakan kolaborasi antara kesepadanan kemampuan, keterampilan dan integritas aparatur pengelola keuangan serta pengambil kebijakan yang memfokuskan kinerja yang efektif dan efisien, baik kinerja dari sudut proses maupun dari sudut hasil, dampak dan manfaat.
- 3. Handal** mengandung makna bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk menjadi unit kerja yang terpercaya dan handal yaitu melalui Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis melaksanakan melalui 2 (dua) Misi yang merupakan

pernyataan garis besar tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis selama dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yang harus dijalankan, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan tata kelola Keuangan dan Aset Daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi;
3. Melaksanakan pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan RKPD
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Renja ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam mencapai prioritas pembangunan tahun 2020. Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah;

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 bagi setiap bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkalis.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan
- Untuk meningkatkan kinerja OPD berpedoman pada penganggaran yang berbasis kinerja dan hasil yang dicapai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020 dan capaian Rentra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPKAD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSAAAN RENJA BPKAD KABUPATEN BENGKALIS 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra SOPD

Pelaksanaan hasil evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BPKAD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi BPKAD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BPKAD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra BPKAD dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yakni bidang Keuangan dan Aset. Untuk tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 5 Program dan 69 Kegiatan. Anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk pelaksanaan urusan pilihan adalah sebesar Rp 69.659.660.650,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 22.809.068.060,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 46.850.592.590,00 . Hasil realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah : BTL Rp. 21.280.212.220,00 untuk BL Rp. 42.029.452.085,00.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2019)					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Tingkat Realisasi (%)	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi/ Capaian Program/ Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	K	Rp.	
3.00.03.																		
3.00.03.01.																		
3.00.03.01.01.	Keuangan																	
3.00.03.01.01.01.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																	
3.00.03.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan khusus)																
3.00.03.01.01.01.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dilaksanakan dalam 1 tahun	8000	1.584.400.000	2.000	287.400.000	2.000	319.800.000	2000	297.400.000	100,00	93,00	2000	333.167.000	6000	917.967.000	75,00	57,94
3.00.03.01.01.01.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi/ sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang diadakan dalam 1 tahun	15	4.249.400.000	3	211.377.174	3	585.000.000	3	268.761.625	100,00	45,94	3	994.000.000	9	1.474.138.999	60,00	34,69
3.00.03.01.01.01.01.005.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola	28	7.750.017.700	5	666.808.643	5	1.055.017.700	5	895.410.660	100,00	84,87	1	1.497.588.300	11	3.059.807.803	39,29	39,48
3.00.03.01.01.01.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	20	425.000.000	-	-	20	30.000.000	20	14.496.520	100,00	40,32	20	60.000.000	40	94.496.520	200,00	22,23
3.00.03.01.01.01.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang diadakan dalam 1 tahun	168	1.662.382.375	37	205.327.450	37	341.322.360	37	340.808.354	100,00	99,85	37	356.514.490	111	902.650.294	66,07	54,30
3.00.03.01.01.01.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan	180	2.080.724.050	40	266.042.000	40	410.546.370	40	398.936.000	100,00	97,17	40	234.780.000	120	899.758.000	66,67	43,24
3.00.03.01.01.01.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	64	922.594.500	11	90.669.000	11	223.243.000	11	204.978.300	100,00	91,81	13	170.400.000	35	466.047.300	54,69	50,49
3.00.03.01.01.01.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	104	429.257.000	21	40.949.000	21	114.662.000	21	96.652.000	100,00	84,29	21	66.529.000	63	204.130.000	60,58	47,55
3.00.03.01.01.01.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 Tahun	115	410.000.000	20	19.400.000	20	20.000.000	20	9.400.000	100,00	47,00	20	55.000.000	60	83.800.000	52,17	20,44
3.00.03.01.01.01.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	4000	1.272.350.000	4.895	35.000.000	11.270	265.050.000	11.270	229.200.000	100,00	86,47	800	177.500.000	16965	441.700.000	424,13	34,72
3.00.03.01.01.01.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah banyaknya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1315	4.870.000.000	100	1.314.457.803	300	925.000.000	300	915.081.765	100,00	98,93	150	750.000.000	550	2.979.539.568	41,83	61,18
3.00.03.01.01.01.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia dalam 1 tahun	44	1.249.400.000	8	246.042.000	8	153.600.000	8	153.600.000	100,00	100,00	8	153.600.000	24	553.242.000	54,55	44,28
3.00.03.01.01.01.01.033.	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia dalam 1 tahun	10	292.000.000	2	38.400.000	2	38.400.000	2	38.400.000	100,00	100,00	2	38.400.000	6	115.200.000	60,00	39,45
3.00.03.01.01.01.01.048.	Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Pengelolaan Arsip SKPKD yang diadakan dalam 1 tahun	31000	2.240.624.000	3000	408.741.050	7.000	390.781.200	7000	298.336.100	100,00	76,34	7000	444.623.000	17000	1.151.700.150	54,84	51,40
3.00.03.01.01.01.01.011.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan																

Kode	Unitas/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2019)					
			Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.00.3.00.03.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan dalam 1 tahun	169	65.105.710.000	78	14.743.661.900	29	10.995.000.000	29	9.997.222.175	100,00	90,93	89	12.690.400.000	196	37.431.284.075	115,98	57,19
3.00.3.00.03.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	12	1.657.400.000	7	99.550.000	3	89.400.000	3	84.100.000	100,00	94,07	3	185.000.000	13	368.650.000	108,33	22,24
3.00.3.00.03.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	24	5.906.400.000	10	156.400.000	6	481.300.000	5	352.500.000	83,33	73,24	52	586.375.000	67	1.095.275.000	279,17	18,54
3.00.3.00.03.01.02.010	Pengadaan mebelatur	Jumlah pengadaan Meubeler gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	39	2.483.130.000	2	179.000.000	2	61.450.000	2	61.450.000	100,00	100,00	125	392.554.100	129	633.004.100	330,77	25,49
3.00.3.00.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun	5	3.066.200.000	1	712.980.000	1	700.000.000	1	384.322.000	100,00	54,90	1	578.000.000	3	1.675.302.000	60,00	54,64
3.00.3.00.03.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan dalam 1 Tahun	38	2.007.500.000	8	405.908.813	8	225.000.000	8	211.283.454	100,00	93,90	38	330.000.000	54	947.192.267	142,11	47,18
3.00.3.00.03.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	50	1.605.000.000	10	281.253.000	10	313.000.000	10	170.230.300	100,00	54,39	9	345.000.000	29	796.483.300	58,00	49,63
3.00.3.00.03.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah ruangan yang direhab dalam 1 tahun	30	3.842.000.000	6	107.171.000	6	48.000.000	6	47.409.000	100,00	98,77	8	1.136.000.000	20	1.230.580.000	66,67	33,59
3.00.3.00.03.01.02.094	Pengadaan Interior	Peningkatan Ruang Kerja Kantor ASN	3	7.560.000.000	0	-	0	0	0	-	-	-	1	667.543.650	1	667.543.650	33,33	8,83
3.00.3.00.03.01.02.203	Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Bengkalis	Jumlah pengadaan Peralatan Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	52	6.721.768.000	10	139.530.000	13	1.152.335.000	13	1.147.889.300	100,00	99,61	13	815.710.050	36	2.103.129.350	69,23	31,29
3.00.3.00.03.01.02.204	Pengadaan mebelur Kabupaten Bengkalis	Jumlah pengadaan Meubeler Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	52	5.706.069.000	43	146.650.000	56	268.343.000	56	266.020.700	100,00	99,13	495	377.503.000	594	790.173.700	1.142,31	13,85
3.00.3.00.03.01.02.001	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya																
3.00.3.00.03.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus, workshop, seminar yang dilaksanakan dalam 1 tahun	740	1.370.000.000	420	723.809.500	100	140.000.000	100	136.900.000	100,00	97,79	77	434.700.000	597	1.295.409.500	80,68	94,56
3.00.3.00.03.01.06.001	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu																
3.00.3.00.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	5	1.234.148.600	1	58.965.000	1	177.764.900	1	81.920.600	100,00	46,08	1	300.000.000	3	440.885.600	60,00	35,72
3.00.3.00.03.01.06.007	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD	Jumlah dokumen renja, renstra, RKA, dan laporan kinerja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	5	879.396.050	1	55.159.936	1	145.358.800	1	144.095.500	100,00	99,13	6	290.300.000	8	489.555.536	160,00	55,67
3.00.3.00.03.01.06.052	Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada bendahara PKPD	Jumlah administrasi dan penatausahaan yang tersedia dalam 1 tahun	5	3.325.652.450	0	-	1	652.574.800	1	612.740.500	100,00	93,90	1	698.263.400	2	1.311.003.900	40,00	39,42



Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran)	Target Rencana SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Rencana SKPD)		Realisasi Copelan Kinerja (2017)		Target Rencana SKPD #/d Tahun Lalu		Realisasi Copelan Kinerja (2017)		Target Rencana SKPD #/d Tahun Lalu		Realisasi Rata-rata Peringkat Daerah Tahun 2018		Target Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan Rencana SKPD		Realisasi Copelan Program (Tahun Berjalan 2019)		Tingkat Capaian Realisasi (Target Kinerja (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
3.00.1.00.03.01.17.004	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Optim Audit terhadap Rencana Pemasaran Daerah Pemasaran Rencana PPD dan Rencana PPD																					
3.00.3.00.03.01.17.004	Penyusunan sistem dan prosedur Sistem Dan Prosedur Pengadaan Keuangan Daerah	Penyusunan sistem dan prosedur Sistem Dan Prosedur Pengadaan Keuangan Daerah	4	1.330.465.000	1	544.048.400	19	-	19	-	100,00	0	-	100,00	96,30	1	149.998.000	20	694.046.400	500,00	52,27		
3.00.3.00.03.01.17.006	Penyusunan rencana program anggaran APBD daerah tingkat APBD	Penyusunan rencana program anggaran yang tersusun dalam 1 tahun	9	12.969.372.100	1	3.362.929.185	1	4.056.182.100	1	3.665.678.966	100,00	96,30	1	2.960.000.000	3	33,33	2.960.000.000	3	10.188.607.581	500,00	78,44		
3.00.3.00.03.01.17.007	Penyusunan rencana program anggaran APBD	KOH tentang Penjabaran Anggaran dan rencana program KOH tentang Penjabaran APBD	6	4.602.933.300	1	2.172.074.885	1	1.331.365.200	1	1.146.539.666	100,00	86,12	2	892.438.100	4	66,67	892.438.100	4	4.212.052.851	500,00	91,52		
3.00.3.00.03.01.17.008	Penyusunan rencana program anggaran APBD	Penyusunan rencana program anggaran APBD yang tersusun dalam 1 tahun	9	1.214.521.100	0	-	1	404.527.400	1	334.794.228	100,00	82,76	2	200.623.500	3	33,33	200.623.500	3	535.417.728	500,00	44,08		
3.00.3.00.03.01.17.009	Penyusunan rencana program anggaran APBD	KOH tentang penjabaran perubahan APBD yang tersusun dalam 1 tahun	100	1.797.605.300	0	-	1	537.622.400	1	497.381.631	100,00	92,52	1	346.094.300	2	2,00	346.094.300	2	843.475.931	500,00	46,92		
3.00.3.00.03.01.17.010	Penyusunan rencana program anggaran APBD	Penyusunan rencana program anggaran APBD yang tersusun dalam 1 tahun	5	1.097.591.300	1	254.391.640	1	244.398.200	1	224.189.350	100,00	91,73	1	264.395.500	3	60,00	264.395.500	3	742.976.490	500,00	67,69		
3.00.3.00.03.01.17.011	Penyusunan rencana program anggaran APBD	KOH tentang penjabaran perubahan APBD yang tersusun dalam 1 tahun	5	1.364.086.942	1	195.899.700	1	323.602.800	1	313.397.424	100,00	96,23	1	346.785.200	3	60,00	346.785.200	3	854.082.324	500,00	62,61		
3.00.3.00.03.01.17.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengabdian keuangan daerah	Jumlah Sosialisasi paket regulasi tentang pengabdian keuangan daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	610	1.766.038.400	200	336.142.117	200	244.220.500	200	187.144.032	100,00	76,63	290	326.564.500	690	49,12	326.564.500	690	849.850.619	500,00	49,12		
3.00.3.00.03.01.17.015	Bandwidth untuk implementasi paket regulasi tentang pengabdian keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mengikuti paket regulasi tentang pengabdian keuangan daerah	180	1.364.140.000	0	-	42	326.060.000	42	316.679.700	100,00	97,12	45	320.200.000	87	48,33	320.200.000	87	636.879.700	500,00	48,33		
3.00.3.00.03.01.17.024	Penyediaan jasa administrasi	Jumlah laporan pelaksanaan kerja SKPD	4	800.821.900	0	-	1	290.830.900	1	215.172.500	100,00	73,99	1	94.997.000	2	30,73	94.997.000	2	310.169.500	500,00	30,73		
3.00.3.00.03.01.17.026	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rencana Kerja	200	338.776.800	0	0	0	-	0	-	-	70	72.694.200	70	21,46	72.694.200	70	72.694.200	35,00	21,46			
3.00.3.00.03.01.17.031	Penyusunan rencana anggaran APBD	Penyusunan rencana anggaran APBD dan evaluasi SPJ SKPD	4	2.768.810.000	0	-	1	667.202.500	1	558.006.318	100,00	83,63	1	477.202.500	2	37,39	477.202.500	2	1.035.208.818	500,00	37,39		
3.00.3.00.03.01.17.032	Penyusunan rencana anggaran APBD	Jumlah buku standar harga barang dan jasa	4	1.780.427.400	1	303.101.500	1	180.108.200	1	169.823.200	100,00	94,29	1	173.131.600	3	36,29	173.131.600	3	646.056.300	75,00	36,29		
3.00.3.00.03.01.17.033	Penyusunan rencana anggaran APBD	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keuangan daerah	280	3.228.515.340	60	1.204.546.125	60	498.000.000	60	493.258.317	100,00	99,06	60	400.000.000	180	64,98	400.000.000	180	2.097.844.442	64,29	64,98		
3.00.3.00.03.01.17.034	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan	8	2.992.721.700	0	-	110	632.721.700	110	754.626.275	100,00	90,62	2	700.000.000	112	48,61	700.000.000	112	1.454.626.275	1.400,00	48,61		
3.00.3.00.03.01.17.043	Penyusunan rencana anggaran APBD	Penyusunan rencana anggaran APBD	325	12.592.613.400	60	2.716.011.200	65	3.133.155.500	65	3.075.655.900	100,00	98,16	65	2.969.152.000	190	69,56	2.969.152.000	190	8.759.819.100	58,46	69,56		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2019)			
			Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.00.3.00.03.01.17.139.	Koordinasi bidang perbendaharaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi	160	1.358.613.600	0	-	40	618.366.000	40	605.047.962	100,00	97,85	40	321.081.100	80	926.129.052	50,00	68,17
3.00.3.00.03.01.17.141.	Pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	Jumlah laporan keuangan	4	2.657.800.400	0	-	1	564.290.100	1	543.925.600	100,00	96,39	1	649.450.100	2	1.193.375.700	50,00	44,90
3.00.3.00.03.01.17.142.	Pemeliharaan Jaringan SIMDA BMD	Jumlah aplikasi SIMDA BMD	5	1.038.704.000	0	-	1	240.000.000	1	239.345.000	100,00	99,73	1	170.000.000	2	409.345.000	40,00	39,41
3.00.3.00.03.01.17.143.	Koordinasi Bidang Aset	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang diadakan dalam 1 tahun	160	950.191.200	0	-	40	222.547.800	40	222.328.700	100,00	99,90	40	212.547.800	80	434.876.500	50,00	45,77
3.00.3.00.03.01.17.147.	Penyusunan pelaporan keuangan daerah akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	4	5.549.668.300	0	-	1	951.075.000	1	924.791.000	100,00	97,15	1	1.372.156.900	2	2.296.947.900	50,00	41,39
3.00.3.00.03.01.17.148.	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan semester	3	456.000.800	0	-	1	69.800.500	1	69.274.500	100,00	99,25	1	99.000.100	2	168.274.600	66,67	36,90
3.00.3.00.03.01.17.149.	Koordinasi bidang akuntansi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang diadakan dalam 1 tahun	160	1.300.288.800	0	-	40	590.288.800	40	540.458.800	100,00	91,56	40	283.521.600	80	823.980.400	50,00	63,37
3.00.3.00.03.01.17.150.	Asistensi penyusunan RKA	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi penyusunan RKA	400	697.779.500	0	-	100	159.492.500	96	139.028.715	96,00	87,17	100	159.429.000	196	296.457.715	49,00	42,77
3.00.3.00.03.01.17.154.	Penyusunan data dasar dalam rangka optimalisasi dana perimbangan	Jumlah Laporan Data Pendukung dana perimbangan	3	1.500.000.000	0	-	1	822.590.100	1	707.685.598	100,00	86,03	1	880.988.100	2	1.588.676.698	66,67	105,91
3.00.3.00.03.01.17.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Perbup tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan barang milik Daerah	4	1.330.465.000	1	544.048.400	19	266.093.000	19	246.841.000	100,00	92,76	0	-	20	790.889.400	500,00	59,44
00.3.00.03.01.17.157.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu	3	1.580.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	295.199.600	1	295.199.600	33,33	18,68
00.3.00.03.01.17.159.	Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai (TNT) bagi Bendahara	Jumlah peserta blmtek yang mengikuti	800	980.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	250	296.903.100	250	296.903.100	31,25	30,30
3.00.3.00.03.01.17.160.	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah SP2D dan Daftar Pengujl	78000	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	26000	500.000.000	26000	500.000.000	33,33	125,00
3.00.3.00.03.01.17.162.	Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	Jumlah Peserta yang Mengetahui Pengelolaan Bendahara Umum Daerah dalam 1 Tahun	125	327.826.200	0	-	0	-	0	-	0	-	50	400.000.000	50	400.000.000	40,00	122,02
3.00.3.00.03.01.17.163.	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berupa Laporan Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12	335.870.471	0	-	0	-	0	-	0	-	1	335.432.671	1	335.432.671	8,33	99,87
3.00.3.00.03.01.17.165.	Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 tahun	4	737.763.000	0	-	0	-	0	-	0	-	10	144.431.700	10	144.431.700	250,00	19,58
								46.850.592.590	42.029.951.889	89,71	50.150.126.661							
<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat Opini BPK RI Terhadap LKPD Kabupaten Bengkulu - Regulasi Peraturan Keuangan dan Aset yang semakin jelas dan nyata - Adanya motivasi untuk peningkatan dalam bekerja - Perlu waktu lama dalam menerima data/laporan keuangan yang akurat dari setiap bidang - Lambatnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan - Masih minimnya kualitas SDM pada Pegawai dalam pelaksanaan Tugas dan Rencana - Peningkatan SDM pada Pegawai dalam memahami Tugas dan Rencana - peningkatan koordinasi di lingkungan kantor dalam pelaksanaan kegiatan - peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi terkait penatausahaan keuangan daerah 																		
Untuk membuat RENCANA dan Pelaksanaan pada kegiatan perlu dilihat indikator kinerja yang harus terukur dan membuat target kegiatan sesuai perencanaan untuk 5 (lima) tahun, dan target pelaksanaan untuk 1 (satu) tahun dengan memperhatikan realisasi keuangannya.																		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis baru terbentuk pada tahun 2017 dan merupakan gabungan antara Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah sehingga hasil evaluasi kinerja untuk renstra sebelumnya terkait pelayanan dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum tersedia. Namun sejak tahun 2013 dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi pelaksanaan APBD tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapatkan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau. Untuk laporan keuangan Kabupaten Bengkalis 3 Tahun berturut-turut (2015-2017).

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja SOPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD		TARGET CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	-	-	210 hari	180 hari	210 Hari	180 hari	180 hari	180 hari	
2	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPd	-	-	85%	90%	100%	100%	100%	100%	
3	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	-	-	3 Hari	2,5 Hari	3 Hari	2,5 Hari	2 Hari	1 Hari	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	76%	77%	55%	77%	78%	79%	
5	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
6	Persentase aset yang terinventarisasi	-	-	72%	74%	65%	87%	90%	100%	
8	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	-	-	50%	60%	0%	61,98%	70%	80%	
9	Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis di hadapkan pada permasalahan-permasalahan yang di harapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2016-2021. Adapun permasalahan-permasalahan berdasarkan analisis adalah :

- a. belum terintegrasinya sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi barang milik daerah;
- b. belum optimalnya pengelolaan dan inventarisasi aset Daerah;
- c. kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah belum optimal;
- d. realisasi belanja SOPD / rendahnya kapasitas aparatur SOPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Bengkalis sebagai unsur Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah Daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat
2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah
3. Implementasi akuntansi berbasis akrual;

4. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
5. Pelaksanaan e-audit dan monitoring pengelolaan kas Daerah secara on-line oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. Pengintegrasian sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistem informasi barang milik Daerah;
7. Tuntutan transparansi informasi Keuangan dan Aset Daerah
8. Inventarisasi aset yang belum optimal
9. Realisasi belanja SKPD / rendahnya kapasitas aparatur SOPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

b. Peluang

1. kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang masih bisa dikembangkan
2. pembentukan kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi SKPD yang mandiri, tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
3. pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/barang milik Daerah;
4. regulasi keuangan dan aset daerah serta penyusunan produk hukum daerah terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. kemajuan teknologi Informasi mendorong pengembangan SIPKD dan integrasi dengan SIMDA dan pelaporan berbasis IT dari SOPD;
6. kualitas penganggaran masih dapat diperbaiki dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja;
7. perbaikan dan penyederhanaan regulasi keuangan dan aset oleh pemerintah;
8. pengembangan website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud akuntabilitas.

2.4 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang di tetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah : ***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.***

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas
2. mewujudkan pengelolaan seluruh potensi Daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat
3. mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat

Berdasarkan misi Kabupaten Bengkalis di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi ke-satu yaitu: ***Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.***

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari RPJMD tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 - 2021

Misi: Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bengkalis

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

Misi 1	Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas		
Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Penataan Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Menyiapkan Penggunaan sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan aset yang terintegrasi dan terkendali dengan baik..	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Melakukan pembinaan terhadap penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan rangkaian Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), dan fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Fungsi yang erat kaitannya dengan usulan program dan kegiatan masyarakat adalah pengelolaan keuangan belanja hibah dan bantuan sosial pada fungsi PPKD. Belanja hibah dan bantuan sosial dimaksudkan untuk menampung usulan/aspirasi pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan Undang Undang 23 Tahun 2011 dan Permendagri 123 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Usulan kegiatan masyarakat tersebut disampaikan dalam bentuk proposal dan rekomendasi dari SKPD terkait untuk diusulkan pada mata anggaran belanja PPKD. Selain dari Pengelolaan belanja PPKD tersebut, BPKAD juga mulai melaksanakan tugas-tugas fasilitasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Program Kemitraan antara Pemerintah dengan pihak swasta/BUMD di lingkungan Kabupaten Bengkalis dalam bentuk mendukung kepentingan sosial masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi RPJMN 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk itu, pembangunan membutuhkan reformasi penuh (*Comprehensive Reform*) yang dilaksanakan bukan dengan cara biasa, dengan prinsip berkelanjutan dan dengan keterpaduan upaya dari berbagai kalangan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

Terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita), diantaranya yang menjadi isu penting bagi rencana kerja BPKAD Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Hal ini akan diinterpretasikan dalam bentuk perbaikan regulasi-regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, akuntabilitas dan transparansi penyusunan anggaran daerah, penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, serta pengembangan sistem informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Hal ini akan didukung melalui upaya peningkatan kualitas dan integritas aparatur Pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sistem pengendalian internal dan penerapan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas, peningkatan asistensi dan supervisi dengan instansi terkait dengan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi.

Didalam menunjang Kebijakan Nasional berkenaan dengan prioritas pembangunan nasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD);
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Pengendalian Anggaran Belanja SKPD;
4. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
5. Pelaksanaan Pengelolaan kekayaan daerah;
6. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
7. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa kebijakan

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional untuk Mendukung Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Maju dan Makmur			
Misi 1: Mewujudkan Anggaran Daerah yang Berbasis Kinerja dan Tepat Waktu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penganggaran Sesuai Peraturan Perundangan	Meningkatnya Kualitas Penyusunan RAPBD Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Penataan Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Menyiapkan penggunaan sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan aset yang terintegrasi dan terkendali dengan baik.
			Melakukan pembinaan terhadap penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah.

Misi 2: Mewujudkan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan			
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku	Meningkatnya Layanan Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan Perundangan	Penataan Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Menyiapkan penggunaan sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan aset yang terintegrasi dan terkendali dengan baik.
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Melakukan pembinaan terhadap penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah.
Misi 3: Mewujudkan Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan			
Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah Yang Baik	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Penataan Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Menyiapkan penggunaan sistem elektronik perencanaan, penganggaran dan aset yang terintegrasi dan terkendali dengan baik.
			Melakukan Pembinaan Terhadap Penggunaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
Misi 4: Mewujudkan SDM yang Profesional dan Berkinerja			
Terwujudnya Lembaga Yang Berkualitas Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Meningkatkan Kapasitas SDM bidang pengelolaan keuangan dan aset.	Meningkatkan kapasitas SDM bidang pengelolaan keuangan dan aset.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKAD KABUPATEN BENGKALIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2016-2021. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Kualitas kelembagaan Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;

2. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;
3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, Pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi belum maksimal;
4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah belum optimal;
5. Kualitas dan efektifitas Pengelolaan Belanja dan Manajemen Kas Daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis;
6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi Barang Milik Daerah, belum maksimal;
7. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual belum optimal;
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah masih harus dioptimalkan sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel serta memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai;
2. Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan aset SKPD.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola Keuangan dan Aset berbasis teknologi informasi;

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja;
4. Meningkatkan Pengelolaan Belanja dan Manajemen Kas Daerah berbasis teknologi informasi yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Meningkatkan pelayanan prima;
7. Meningkatkan transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis beserta indikator kerjanya

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Visi: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional untuk Mendukung Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Maju dan Makmur										
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun					Target Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1: Mewujudkan Anggaran Daerah yang Berbasis Kinerja dan Tepat Waktu										
Meningkatkan kualitas Penganggaran Sesuai Peraturan Perundangan	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	210 Hari	210 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari
	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD		Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD	75%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
Misi 2: Mewujudkan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan										
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	-	3 Hari	2.5 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	76%	77%	78%	79%	80%	80%
	Opini BPK terhadap	Meningkatnya	Opini BPK terhadap	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

	Laporan Keuangan Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Keuangan Daerah							
Misi 3: Mewujudkan Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan										
Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah yang Baik	Persentase aset yang terinventarisasi	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	Persentase aset yang terinventarisasi	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
	Persentase Tanah Milik Pemerintah Bersertifikat		Persentase Tanah Milik Pemerintah Bersertifikat	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
Misi 4: Mewujudkan SDM yang Profesional dan Berkinerja										
Terwujudnya Lembaga yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	-	50%	60%	70%	80%	90%	90%
	Persentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti		Persentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1.1. Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.1.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan rencana kegiatan BPKAD T.A 2020 tidak sepenuhnya berpatokan pada nomenklatur kegiatan dan pagu anggaran yang tercantum pada daftar Program/Kegiatan RKPD, dimana RKPD merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2016–2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan per program serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.2

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
BPKAD KABUPATEN BENGKALIS

BAGIAN : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				22.122.959.418				23.122.959.418
05 02	BELANJA LANGSUNG				66.068.737.390				111.736.501.890
03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)			5.325.513.490				47.935.313.490
03 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang ditindaklanjuti dan penyediaan administrasi dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	2000 Surat;15 Orang	333.167.000	APBD		2000 Surat;15 Orang	333.167.000
03 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	3 Item	994.000.000	APBD		3 Item	994.000.000
03 01 01 005	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah penerima barang milik daerah yang dikelola dalam 1 (satu) Tahun	Kab. Bengkalis	5 Unit	1.200.000.000	APBD		5 Unit	1.230.000.000
03 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	20 Unit	80.000.000	APBD		20 Unit	80.000.000
03 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	37 Item	356.514.490	APBD		37 Item	356.514.490
03 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	40 Item	175.780.000	APBD		40 Item	178.980.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	13 Item	105.400.000	APBD		13 Item	110.400.000
03 01 01 012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	21 Item	66.529.000	APBD		21 Item	66.529.000
03 01 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam 1 Tahun	Bengkalis	20 Item/Media	55.000.000	APBD		20 Item/Media	55.000.000
03 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	800 Box	177.500.000	APBD		800 Box	177.500.000
03 01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah banyaknya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Bengkalis	150 Kali	850.000.000	APBD		150 Kali	850.000.000
03 01 01 019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis	8 Orang	153.600.000	APBD		8 Orang	153.600.000
03 01 01 033	Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang tersedia dalam 1 tahun	Bengkalis	2 Orang	38.400.000	APBD		2 Orang	38.400.000
03 01 01 048	Pengelolaan Arsip SKPKD	Jumlah Pengelolaan Arsip SKPKD yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	7000 Arsip	444.623.000	APBD		7000 Arsip	444.623.000
03 01 01 000	Penyediaan Jasa Pejabat Pengadaan dan Tim Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP)	Persentase tersedianya jasa pejabat pengadaan dan tim asistensi PPHP	Bengkalis	30 Paket	150.000.000	APBD		30 Paket	150.000.000
03 01 01 000	Publikasi Informasi Pembangunan	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi OPD BPKAD Kab. Bengkalis dalam 1 tahun	Bengkalis	Media	145.000.000	APBD		Medis	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan			21.097.975.000				21.283.300.000
03 01 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana transportasi	Bengkalis	59 Unit	10.000.000.000	APBD		59 Unit	10.030.000.000
03 01 02 007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	3 Item	120.000.000	APBD		3 Item	135.000.000
03 01 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan gedung Kantor yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	52 Unit	286.375.000	APBD		52 Unit	287.500.000
03 01 02 010	Pengadaan Meubeler	Jumlah pengadaan Meubeler gedung Kantor yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	125 Unit	170.800.000	APBD		125 Unit	185.000.000
03 01 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	1 Unit	245.800.000	APBD		1 Unit	250.800.000
03 01 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	38 Unit	330.000.000	APBD		38 Unit	330.000.000
03 01 02 028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Kabupaten yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	9 Item	345.000.000	APBD		9 Item	345.000.000
03 01 02 203	Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis	Jumlah peralatan gedung kantor Kabupaten selama 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	21 Item	1.300.000.000	APBD		21 Item	1.330.000.000
03 01 02 204	Pengadaan mebeleur Kabupaten Bengkalis	Jumlah Mebeleur Kabupaten kantor selama 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	14 Item	1.000.000.000	APBD		14 Item	1.030.000.000
03 01 02 000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas pada pengelola dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	10 Unit	300.000.000	APBD		10 Unit	330.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 02 000	Pembangunan Gedung Kantor BPKAD	Kantor BPKAD yang dibangun	Bengkalis	1 Paket	7.000.000.000	APBD		1 Paket	7.030.000.000
03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya			550.700.000				555.700.000
03 01 05 001	Pendidikan Dan Pelatihan Informal	Jumlah kursus, workshop, seminar yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Bengkalis	200 Orang	550.700.000	APBD		200 Orang	555.700.000
03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu			1.989.460.500				2.003.100.000
03 01 06 001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	370.500.000	APBD		1 Dokumen	372.500.000
03 01 06 027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dan pelaporan yang dilakukan asistensi, evaluasi dalam 1 tahun	Bengkalis	6 Dokumen;1 Tahun	520.700.000	APBD		6 Dokumen;1 Tahun	525.700.000
03 01 06 52	Peningkatan administrasi dan penatausahaan pada Bendahara PPKD	Jumlah laporan keuangan PPKD yang tersusun dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	1 Laporan	898.260.500	APBD		1 Laporan	899.900.000
03 01 06 000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase peningkatan laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	1 Laporan	200.000.000	APBD		1 Laporan	205.000.000
03 01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit terhadap Laporan Keuangan Daerah Persentase Kesesuaian PPAS dan RPKD			37.105.088.400				39.959.088.400

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 17 004	Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	326.000.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000
03 01 17 006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah buku perda dan raperda tentang APBD yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	2 Dokumen	4.500.000.000	APBD		2 Dokumen	4.550.000.000
03 01 17 007	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD anggaran dan rancangan peraturan daerah yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	2 Dokumen	1.300.000.000	APBD		2 Dokumen	1.350.000.000
03 01 17 008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah raperda tentang Perubahan APBD anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	2 Dokumen	400.000.000	APBD		2 Dokumen	450.000.000
03 01 17 009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang perubahan pejabaran Tahun anggaran 2019 yang tersusun dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	2 Dokumen	540.000.000	APBD		2 Dokumen	545.000.000
03 01 17 010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Dokumen	364.395.500	APBD		1 Dokumen	414.395.500
03 01 17 011	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun dalam 1 tahun	Bengkalis	1 Dokumen	576.785.200	APBD		1 Dokumen	676.785.200
03 01 17 014	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam 1 (satu)	Bengkalis	290 Orang	350.000.000	APBD		290 Orang	450.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 17 015	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis yang mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	100 Orang	350.000.000	APBD		100 Orang	450.000.000
03 01 17 024	Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD	Jumlah laporan pelaksana belanja SKPKD	Bengkalis	1 Laporan	300.000.000	APBD		1 Laporan	350.000.000
03 01 17 026	Rapat Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta rapat kerja	Bengkalis	50 Orang	250.000.000	APBD		50 Orang	350.000.000
03 01 17 031	Pelaksanaan Pembinaan Analisis dan Evaluasi SPJ SKPD	Jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepat waktu dalam 1 Tahun	Bengkalis	45 OPD	800.000.000	APBD		45 OPD	850.000.000
03 01 17 032	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Jumlah buku standar harga barang dan jasa	Kab. Bengkalis	70 Buku	300.000.000	APBD		70 Buku	330.000.000
03 01 17 033	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang mengetahui pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun	Bengkalis	60 Orang	450.000.000	APBD		60 Orang	450.000.000
03 01 17 034	Penyusunan DPA/DPPA SKPD	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan	Kab. Bengkalis /Dalam dan Luar Provinsi Riau	50 Orang	850.000.000	APBD		50 Orang	850.000.000
03 01 17 043	Penyediaan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga akuntansi yang tersedia pada SOPD dalam 1 tahun	Bengkalis	65 orang	3.098.152.000	APBD		65 orang	3.098.152.000
03 01 17 047	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan APBD	Bengkalis	120 Orang	350.000.000	APBD		120 Orang	450.000.000
03 01 17 052	Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasana aparatur dalam satu tahun	Bengkalis	85 Orang	525.000.000	APBD		85 orang	555.000.000
03 01 17 053	Penatausahaan Aset Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan aset milik daerah	Kab. Bengkalis	1 Laporan	750.000.000	APBD		1 Laporan	780.000.000
03 01 17 060	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah laporan penghapusan aset daerah	Bengkalis	1 Laporan	500.000.000	APBD		1 Laporan	530.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 17 063	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD dan DKBMD	Kab. Bengkalis	1 Laporan	350.000.000	APBD		1 Laporan	380.000.000
03 01 17 065	Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah laporan aset daerah	Bengkalis	1 Laporan	870.500.000	APBD		1 Laporan	900.500.000
03 01 17 066	Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SOPD di Kab. Bengkalis	Bengkalis	1 Aplikasi	1.679.900.000	APBD		1 Aplikasi	1.679.900.000
03 01 17 084	Bimbingan Teknis Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Bagi Bendahara	Jumlah Peserta Bimtek yang Memahami Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	Bengkalis	50 Orang	700.000.000	APBD		50 Orang	750.000.000
03 01 17 117	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas dalam 1 Tahun	Bengkalis	20 Kali	450.000.000	APBD		20 Kali	500.000.000
03 01 17 119	Persiapan, Pemantapan, dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD	Peningkatan penatausahaan PPK BLUD dalam 1 tahun	Bengkalis	2 BLUD	380.245.400	APBD		2 BLUD	480.245.400
03 01 17 120	Penyusunan dan Desiminasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang keuangan daerah	Bengkalis	6 Dokumen	800.000.000	APBD		6 Dokumen	850.000.000
03 01 17 121	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	Bengkalis	60 Orang	700.000.000	APBD		60 Orang	750.000.000
03 01 17 122	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok - Pokok Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Perda tentang Pokok-pokok pengelola keuangan daerah yang tersusun dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	450.000.000	APBD		1 Dokumen	455.000.000
03 01 17 126	Peningkatan kapasitas Pengelolaan System Informasi Keuangan Daerah	Jumlah super admin /admin/operator komputer SIPKD yang mendapat pelatihan dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	550.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 17 127	Koordinasi Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 (satu)	Bengkalis	50 Kali	550.000.000	APBD		50 Kali	550.000.000
03 01 17 129	Penyusunan Laporan dan Penyetoran Potongan Gaji Untuk PFK dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi PPUPN	Jumlah laporan penyetoran potongan gaji untuk PFK dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi PPUPN dalam 1	Bengkalis	1 Laporan	550.000.000	APBD		1 Laporan	750.000.000
03 01 17 136	Penyusunan Laporan Realisasi SP2D	Jumlah laporan realisasi sp2d/BKU BUD dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Laporan	700.000.000	APBD		1 Laporan	750.000.000
03 01 17 137	Penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji kepada PNS pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal	Jumlah laporan surat SKPP terhadap PNS pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam 1 Tahun	Kab. Bengkalis	1 Laporan	450.000.000	APBD		1 Laporan	500.000.000
03 01 17 139	Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bengkalis	40 kali	500.000.000	APBD		40 kali	550.000.000
03 01 17 141	Pengamanan dan Pengawasan Aset Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset milik daerah	Bengkalis	1 Laporan	650.000.000	APBD		1 Laporan	680.000.000
03 01 17 142	Pemeliharaan jaringan Aplikasi SIPKD	Jumlah aplikasi SIMDA BMD	Bengkalis	1 aplikasi	450.000.000	APBD		1 aplikasi	480.000.000
03 01 17 143	Koordinasi Bidang Aset	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Bengkalis	40 Kali	400.000.000	APBD		40 Kali	430.000.000
03 01 17 147	Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	Bengkalis	1 Dokumen	1.797.156.900	APBD		1 Dokumen	1.897.156.900
03 01 17 148	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	134.000.100	APBD		1 Dokumen	184.000.100
03 01 17 149	Koordinasi Bidang Akuntansi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang diadakan dalam 1 tahun	Bengkalis	50 kali	798.521.600	APBD		50 kali	898.521.600
03 01 17 150	Asistensi Penyusunan RKA	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi penyusunan RKA	Bengkalis	100 orang	200.000.000	APBD		100 orang	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 17 154	Penyusunan Data Dasar dalam Rangka Optimalisasi Dana Perimbangan	Jumlah laporan data dana perimbangan kabupaten bengkalis dalm 1 Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	900.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000
03 01 17 157	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah dapat terinventarisasi	Bengkalis	1 Laporan	350.000.000	APBD		1 Laporan	380.000.000
03 01 17 158	Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah peserta yang memahami dan melaksanakan transaksi non tunai dalam 1 Tahun	Bengkalis	60 Orang	400.000.000	APBD		60 Orang	450.000.000
03 01 17 160	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah laporan Penatausahaan Perbendaharaan dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 laporan	600.000.000	APBD		1 Laporan	650.000.000
03 01 17 162	Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	Jumlah Peserta Kapasitas Penatausahaan Bendahara Umum Daerah dalam 1 Tahun	Bengkalis	50 Orang	600.000.000	APBD		50 Orang	650.000.000
03 01 17 163	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan atas Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 1 Tahun	Bengkalis	1 Dokumen	400.000.000	APBD		1 Dokumen	450.000.000
03 01 17 165	Koordinasi Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/Barang Daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana dalam 1 tahun	Bengkalis	10 Kali	264.431.700	APBD		10 Kali	364.431.700
03 01 17 000	Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD TA. 2020	Peningkatan kinerja sarana aparatur yang terlaksana dalam 1 tahun	Bengkalis	3 Kali	650.000.000	APBD		3 Kali	800.000.000
03 01 17 000	Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer	Bengkalis	20 Kali	250.000.000	APBD		20 Kali	300.000.000
03 01 17 000	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dapat direkonsiliasi dalam 1 (satu) tahun	Kab. Bengkalis	1 Laporan	350.000.000	APBD		1 Laporan	380.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Renja 2020 (Rp)			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01 17 000	Sosialisasi tentang Persediaan dan Penyusutan Barang Milik Daerah	Peningkatan pemahaman aparaturnya pengelola barang milik daerah terhadap stock opname dan penyusutan BMD	Kab. Bengkalis	90 Orang	500.000.000	APBD		90 Orang	530.000.000
03 01 17 000	Penyusunan Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Bupati tentang pengelolaan barang milik daerah yang dapat disusun dalam 1 (satu) tahun	Bengkalis	3 Dokumen	600.000.000	APBD		3 Dokumen	630.000.000
03 01 17 000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang menjadi LHP BPK untuk dilakukan penilaian dalam 1 (satu) Tahun	Bengkalis	3 Dokumen	300.000.000	APBD		3 Dokumen	330.000.000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					22.122.959.418				23.122.959.418
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					66.068.737.390				69.169.901.890
JUMLAH BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG					88.191.696.808				92.292.861.308

Bengkalis, Februari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



AULIA, S.Pi, MT

Pembina TK I

NIP. 19701109 199903 1 005

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2016–2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun dengan instansi terkait lainnya.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pejabat dan aparatur di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tanggal, Februari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



AULIA, S.Pi, MT

Pembina Tk. I

NIP.19701109 199903 1 005